

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan “Otonomi Daerah”. Hal tersebut ditandai dengan adanya UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Adanya desentralisasi pengelolaan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, memaksa pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

**Irma rahmawati, 2012**

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi

bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas oleh organisasi sektor publik (seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003). Pada bagian lain akuntabilitas lebih terkait dengan tanggungjawab keuangan: dimana sumber keuangan didapat, bagaimana penganggaran, peruntukan dan mekanisme pelaporannya. Akuntabel berarti administrasi tertib, wajar, transparan dan dapat diaudit sewaktu-waktu (Alfian, 2009).

Transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini adalah meningkatnya penekanan proses akuntabilitas publik atau bentuk pertanggungjawaban horisontal, khususnya bagi aparat pemerintahan di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintahan atasan dalam segala aspek pemerintahan, termasuk aspek penatausahaan dan

**Irma rahmawati, 2012**

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002.

Pemerintah bertanggungjawab kepada masyarakat karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara langsung (diperoleh dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri), maupun tidak langsung (melalui mekanisme perimbangan keuangan). Pola pertanggungjawaban pemerintah daerah sekarang ini lebih bersifat horisontal di mana pemerintah daerah bertanggungjawab baik terhadap DPRD maupun pada masyarakat luas (*dual horizontal accountability*). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Namun demikian, pada kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada masyarakat luas (Mardiasmo, 2002).

Terdapat beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan konsep akuntabilitas di Indonesia antara lain adalah: rendahnya standar kesejahteraan pegawai sehingga memicu pegawai untuk melakukan penyimpangan guna mencukupi kebutuhannya dengan melanggar azas akuntabilitas, faktor budaya seperti kebiasaan mendahulukan kepentingan keluarga dan kerabat dibanding pelayanan kepada masyarakat, dan lemahnya sistem hukum yang mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap faktor *punishment* jika sewaktu-waktu terjadi penyimpangan khususnya di bidang keuangan dan administrasi, semua hambatan tersebut pada dasarnya akan dapat terpecahkan jika pemerintah dan seluruh

**Irma rahmawati, 2012**

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi

komponennya memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya implementasi akuntabilitas disamping faktor moral individu pelaksana untuk menjalankan pemerintahan secara amanah ([www.itjen.depkominfo.go.id](http://www.itjen.depkominfo.go.id)).

Dalam Siaran Pers BPK RI, 23 Juni 2008 disebutkan bahwa, selama sepuluh tahun setelah reformasi, hampir belum ada kemajuan signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara/Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam tiga tahun terakhir secara umum masih buruk. Kondisi ini semakin memburuk, sebagaimana di ungkapkan dalam siaran pers BPK RI pada tanggal 15 Oktober 2008 yaitu : dilihat dari persentase LKPD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama periode 2004-2007 semakin menurun setiap tahunnya. Persentase LKPD yang mendapatkan opini WTP semakin berkurang dari 7% pada tahun 2004 menjadi 5% pada tahun berikutnya dan hanya 1% pada tahun 2006 dan 2007. Sebaliknya, LKPD dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) semakin meningkat dari 2% pada tahun 2004 menjadi 17% pada tahun 2007 dan pada periode yang sama opini Tidak Wajar (TW) naik dari 3% menjadi 19%.

Kondisi yang semakin buruk ini sangat memprihatinkan mengingat dana yang dikelola oleh pemerintah adalah dana publik. Disamping itu, kondisi ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan mereka dengan menerapkan akuntansi menuju transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

**Irma rahmawati, 2012**

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Menurut data yang diperoleh dari Kompas (2011), terkait dengan akuntabilitas permasalahan yang ada yaitu:

Akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sangat rendah. Dalam evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 29 pemerintah provinsi dan 57 pemerintah kabupaten/kota, hanya 16 persen yang mendapat nilai cukup. Jumlah ini menjadi jauh lebih rendah bila dilihat di keseluruhan 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini terungkap dalam penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jakarta pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011. Predikat ini mengindikasikan masih diperlukan perbaikan yang tidak mendasar.

Tidak ada provinsi yang mendapat predikat memuaskan, sangat baik, atau baik. Sebaliknya, 20 provinsi lain mendapatkan predikat agak kurang dan kurang. Hanya pada Kota Sukabumi mendapat predikat baik atau skor 65-75, sedangkan Kabupaten Sukabumi masih mendapatkan predikat agak kurang. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Evert Erenst Mangindaan mengatakan, "Nyata sekali bila perencanaan tidak baik, kegiatan juga tidak akan berhasil baik. Pertanggungjawaban keuangan dan kemanfaatan untuk masyarakat juga dievaluasi,".

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

**Irma rahmawati, 2012**

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi

Secara umum Pemerintah Kota Sukabumi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013. Dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk kemakmuran masyarakat dengan penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber PAD. Penerapan prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi tahun 2010 yang termuat dalam RKPD tahun 2010.

Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

APBD Kota Sukabumi pada tahun 2010 sebesar Rp.576.630.173.000,00 dengan rincian realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp.565.444.987.651,00 dan realisasi belanja sebesar Rp.570.879.897.089,00 sehingga terjadi defisit sebesar Rp.5.434.909.438,00.

Sementara itu, realisasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi selama periode tahun 2007-2010 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan PAD Kota Sukabumi Tahun 2007-2010**

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	APBD	Proporsi Terhadap APBD
-------	------------	---------------	------	------------------------

Irma rahmawati, 2012

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi

				(%)
2007	36,404,000,000	43,847,983,000	441,859,913,000	9.92%
2008	41,592,000,000	52,871,774,000	478,572,641,000	11.05%
2009	53,319,776,000	63,134,763,000	582,333,706,000	10.84%
2010	82.401.066.000	91.767.476.065	576.630.173.000	15.91%

Sumber: LAKIP Kota Sukabumi Tahun 2010

Dari tabel tersebut di atas terlihat adanya peningkatan realisasi PAD dan peningkatan proporsi pendapatan asli daerah terhadap APBD. Pada tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh Rp. 91.767.476.065,00 dari target Rp. 82.401.066.000,00 atau capaiannya hingga 111,37% serta proporsi terhadap APBD mencapai 15,91%. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

Terkait dengan target dan realisasi belanja, sejak Tahun 2007 sampai tahun 2009 proporsi Belanja Langsung selalu lebih besar dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung, namun pada tahun 2010 Belanja Tidak Langsung mencapai 53,66%, sedangkan Belanja Langsung hanya mencapai 46,34%. Hal ini disebabkan dalam Belanja Tidak Langsung ada peningkatan yang signifikan dari bantuan provinsi yang semua itu digunakan untuk kepentingan langsung masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007-2010**

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Proporsi (%)	Belanja Langsung	Proporsi (%)
2007	218,883,566,000	49.5%	222,976,347,000	50.5%
2008	227,491,038,000	47.5%	251,081,603,000	52.5%
2009	281,530,059,000	48.3%	300,803,647,000	51.7%
2010	309.437.752.000	53.6%	267.192.421.000	46.4%

Sumber: LAKIP Kota Sukabumi Tahun 2010

Irma rahmawati, 2012

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi

Untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan Kota Sukabumi dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki berupaya menggali dana pembangunan dari berbagai sumber dari sektor jasa, perdagangan, dan sektor sekunder lainnya.

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2010 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi akumulasi s.d Tahun 2010	Rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2013	Presentase Capaian Kinerja (%)
1	Raperda APBD tepat waktu	Raperda	2	2	100
2	Perda APBD tepat waktu	Perda	2	2	100
3	Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah	%	40.8	54,8	74,45
4	Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah	%	59.2	45,2	130,97
5	Rasio efisiensi belanja	%	<100*)	<100	100
6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WDP*)	WTP	WDP
7	Meningkatnya PAD	Rp. Juta	91,767	58.010	158,19
8	Besaran Pinjaman yang terealisasi terhadap rencana pinjaman	%	-	-	100

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2010.

Berdasarkan tabel di atas, hanya rasio Belanja Langsung yang masih di bawah target jika dibandingkan target tahun 2013. Namun demikian,

Irma rahmawati, 2012

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi



perkembangan pola penganggaran akan berubah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Selanjutnya, mengenai opini BPK terhadap laporan keuangan daerah pada saat ini masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian) sehingga dengan kinerja aparatur yang semakin baik akan mengarah opini menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dari data di atas, maka laporan keuangan yang di sajikan Pemerintah Kota Sukabumi sudah bisa dikatakan akuntabel dengan pertimbangan administratif tertib, wajar, transparan, dan dapat di audit sewaktu-waktu (Alfian: 2009).

Secara objektif masih banyak masalah dan tantangan yang harus di selesaikan dan menjadi prioiritas Pemerintah Kota Sukabumi tetapi di lain pihak kondisi dan kemampuan pemerintah dalam hal penyediaan anggaran masih terbatas, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, equity dan ekonomis tetap menjadi dasar untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha belum sesuai dengan harapan, walaupun secara bertahap pertumbuhan ekonomi ada peningkatan namun belum secara signifikan meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian dalam pengalokasian belanja daerah tentunya harus memperhatikan tolok ukur dan target kinerja yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tetapi dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas dan

**Irma rahmawati, 2012**

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

transparansi. Untuk mendukung akuntabilitas *internal control* dan *eksternal control* yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber pendapatan daerah yang dimiliki sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaannya supaya tidak mengalami defisit fiskal (UU No 32 Tahun 2004).

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan tersebut terkadang pihak pemerintah menemui kendala yang berakibat pada kondisi perekonomian. Hal tersebut bisa dikatakan wajar, karena seperti yang dikutip Bappenas (2007:14), guna merumuskan tata pemerintahan yang baik dalam aturan yang lebih implementatif melalui essaynya *Consideretaions On Representative Government* mengamati dan menjadikan kendala yang pada umumnya didasari oleh kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas dikalangan pelaku khususnya sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai pemicu untuk mengawali upaya menggali secara teoritis hubungan antara birokrasi dan pemerintahan.

Untuk dapat mengurangi kendala dalam mendukung terciptanya *good government governance* menurut Mardiasmo (2002:25) diperlukan adanya reformasi kelembagaan, reformasi pada manajemen publik dan terutama reformasi lanjutan yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Diantaranya adalah melakukan perubahan pendekatan dalam penganggaran, yang awalnya menggunakan penganggaran tradisional (*traditional budget*) menjadi penganggaran berbasis kinerja (*performance budget*). Di Indonesia pengelolaan

keuangan berbasis kinerja mulai diwajibkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum dilakukan secara maksimal.

Dalam pembaharuan sistem keuangan tersebut diharapkan pengelolaan uang rakyat dapat dilakukan secara transparan dengan berdasarkan pada prinsip *value for money* (efektif, efisien, dan ekonomis), sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Bukan hanya fakta yang penulis cari untuk melengkapi latar belakang penelitian ini, namun penulis juga berusaha mencari penelitian sebelumnya yang dianggap berhubungan dengan variabel yang penulis teliti. Adapun penelitian yang penulis dapatkan adalah penelitian yang dilakukan oleh Parhusip (2007) tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik dan transparansi di Pemerintah Kota/Kabupaten yang terjadi pemekaran menunjukkan bahwa, penerapan anggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan secara signifikan akuntabilitas publik dan transparansi di pemerintahan daerah/kota yang terjadi pemekaran.

Selain penelitian tersebut penulis juga menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Agung Sugih Arti (2009) untuk penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas dinas pendidikan Kota Depok, hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa para pemangku kepentingan menilai penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap tingkat akuntabilitas di lingkup

**Irma rahmawati, 2012**

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi

Dinas Pendidikan Kota Depok, kecuali variabel ekonomi yang masih dideskripsikan negatif oleh para pemangku kepentingan.

Namun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah variabel Y yang lebih spesifik meneliti akuntabilitas keuangan, tapi untuk variabel X memiliki kesamaan yaitu tentang anggaran berbasis kinerja. Berikut adalah tinjauan atas penelitian sebelumnya:

**Tabel 1.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Parhusip, Poltak Teodorus/ 2007	Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik dan transparansi di Pemerintah Kota/Kabupaten yang terjadi pemekaran	<u>Variabel Independen</u> Anggaran berbasis kinerja <u>Variabel Dependen</u> • Akuntabilitas publik • Transparansi	Penerapan anggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan secara signifikan akuntabilitas publik dan transparansi di pemerintahan daerah/kota yang terjadi pemekaran.
2.	Agung Sugih Arti/ 2009	Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas dinas pendidikan kota depok	<u>Variabel Independen</u> Anggaran berbasis kinerja <u>Variabel Dependen</u> Akuntabilitas	Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap tingkat akuntabilitas di lingkup Dinas Pendidikan Kota Depok, kecuali variabel ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu peningkatan pada variabel ekonomi yang masih dideskripsikan negatif.

Irma rahmawati, 2012

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi

Berdasarkan latar belakang tersebut, bahwa anggaran berbasis kinerja akan membantu pelaksanaan akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi** ”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Gambaran Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Sukabumi?
2. Bagaimanakah Gambaran Akuntabilitas Keuangan pada Pemerintah Kota Sukabumi?
3. Seberapa besar pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh anggaran berbasis kinerja yang dinilai dengan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis terhadap akuntabilitas keuangan yaitu integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah Kota Sukabumi.

Irma rahmawati, 2012

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Gambaran Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui Gambaran Akuntabilitas Keuangan pada Pemerintah Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini sendiri merupakan salah satu cara untuk mempertajam analisis terhadap fenomena yang dikaitkan dengan teori yang ada. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan teori untuk bidang ilmu akuntansi. Baik untuk akuntansi pemerintahan ataupun untuk akuntansi perilaku dan untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari, melengkapi temuan-temuan empiris serta menambah wawasan tentang Anggaran Berbasis Kinerja dan bagaimana pengaruhnya terhadap akuntabilitas keuangan.

**Irma rahmawati, 2012**

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

### 1.4.2 Kegunaan Empiris

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan empiris yaitu:

1. Bagi Pemerintah kota Sukabumi, hasil penelitian ini dapat menghimpun informasi sebagai sumbangan pemikiran untuk dijadikan referensi serta masukan guna meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, serta dapat menjadi sumber informasi.